

**PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK GUNA PENINGKATAN  
PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK PRATAMA  
SOEGIJOPRANOTO BONGSARI SEMARANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh:

dr. Martin Livanto Wibisono, AIFO-K

NIM: 22.C2.0005

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2026**

**PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK GUNA PENINGKATAN  
PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK PRATAMA  
SOEGIJOPRANOTO BONGSARI SEMARANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh:

dr. Martin Livanto Wibisono, AIFO-K

NIM: 22.C2.0005

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Pada beberapa negara, penggunaan rekam medis elektronik (RME) di fasilitas pelayanan kesehatan berkembang dengan sangat pesat, mengingat bahwa masalah kesehatan ialah masalah yang penting dalam kehidupan masyarakat. Namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia, walaupun telah diterbitkan regulasi yang tertuang dalam PMK No 24 Tahun 2022 namun masih banyak problematika yang timbul dalam penerapan RME terutama di Klinik Pratama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti kurangnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta perkembangan teknologi informasi yang belum signifikan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan : (1) bagaimana pengaturan RME di Klinik Pratama Soegijopranoto Bongsari Semarang, (2) bagaimana penerapan RME dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Soegijopranoto Bongsari Semarang, dan (3) apa kendala dalam penerapan RME di Klinik Pratama Soegijopranoto Bongsari Semarang dan bagaimanakah solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif

Dari hasil penelitian disimpulkan Klinik Soegijopranoto telah memiliki SOP dan Surat Keputusan Pimpinan Klinik No. 020/SK/KP/NON MEDIS/V/2024 yang mengatur penyelenggaraan RME, tata cara pengisian RME, penyimpanan rekam medis dan rekam medis elektronik, serta alur pelayanan pasien. Peraturan tersebut telah dilaksanakan, meskipun masih ada yang belum dijalankan secara maksimal. Dalam aspek yuridis maupun empiris, penerapan RME di Klinik Soegijopranoto dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memahami bahwa RME wajib dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang berlaku. RME cukup efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja petugas dalam melakukan pelayanan kesehatan dengan menjalankan sistem aplikasi RME. Dari sisi pasien merasakan peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga pencatatan medis, akses informasi kesehatan menjadi lebih mudah dan lebih ringkas, namun beberapa pasien berpendapat penyelenggaraan rekam medis elektronik rentan terjadi pelanggaran penyalagunaan data privasi digital. Hambatan dalam pelaksanaan RME di Klinik Soegijopranoto adalah beberapa tenaga kesehatan masih belum kompeten, jumlah SDM masih kurang, sering terjadi *error* pada sistem, infrastruktur kurang memadai, biaya operasional yang terbatas, beberapa pasien lansia masih belum mengerti mengenai sistem RME.

**Kata kunci:** rekam medis elektronik, pelayanan kesehatan, klinik pratama, klinik soegijopranoto

## ABSTRACT

In several countries, the use of electronic medical records (EMRs) in health care facilities has developed very rapidly, given that health issues are of critical importance in societal life. However, this is not the case in Indonesia. Although regulations have been issued in Minister of Health Regulation (Peraturan Menteri Kesehatan/PMK) No. 24 of 2022, numerous problems still arise in the implementation of EMRs, particularly in primary clinics (Klinik Pratama) in the provision of health services, such as limited capability of human resources involved in health care, inadequate facilities and infrastructure, and relatively modest development of information technology.

This study addresses the following issues: (1) how EMRs are regulated at Pratama Soegijopranoto Clinic, Bongsari, Semarang; (2) how the implementation of EMRs can improve health services at Pratama Soegijopranoto Clinic, Bongsari, Semarang; and (3) what obstacles are encountered in the implementation of EMRs at Pratama Soegijopranoto Clinic, Bongsari, Semarang and what solutions can be proposed to overcome these obstacles.

The study employs an empirical juridical approach. The research is descriptive-analytical in nature and uses qualitative data analysis methods. The findings indicate that Soegijopranoto Clinic already has standard operating procedures (SOPs) and a Clinic Director's Decree No. 020/SK/KP/NON MEDIS/V/2024 regulating the implementation of EMRs, procedures for completing EMRs, the storage of medical and electronic medical records, as well as the patient care pathway. These regulations have been implemented, although some aspects have not yet been carried out optimally. From both juridical and empirical perspectives, the implementation of EMRs at Soegijopranoto Clinic can improve health services, and medical and health personnel understand that EMRs must be implemented on the basis of the applicable legal framework. EMRs are reasonably effective in increasing staff productivity in delivering health services through the use of the EMR application system.

From the patient perspective, there has been a perceived improvement in health services from registration and examination to medical documentation; access to health information has become easier and more concise. However, some patients consider that the implementation of electronic medical records is vulnerable to violations and misuse of digital privacy data. The obstacles to the implementation of EMRs at Soegijopranoto Clinic include the fact that several health workers are still not fully competent, the number of human resources remains insufficient, system errors occur frequently, infrastructure is inadequate, operational funds are limited, and some elderly patients still do not understand the EMR system.

**Keywords:** electronic medical records, healthcare services, primary clinic, Soegijopranoto Clinic